

Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Dekonsentrasi Penanaman Modal Asing (PMA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat

Dhuhaira Ratu Hussein¹, Syamsir²

¹Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, email: dhuhairahussein@gmail.com

²Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, Syamsirsaili@yahoo.com

*Korespondensi Dhuhaira Ratu Hussein

ABSTRAK

Pengelolaan anggaran dekonsentrasi pada sektor publik memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui fasilitasi Penanaman Modal Asing (PMA). Di tengah peningkatan target investasi nasional, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama keterbatasan anggaran operasional sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran serta tuntutan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan investasi. Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada tingkat serapan anggaran, efisiensi belanja pemerintah daerah, dan pengelolaan keuangan sektor publik secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji efisiensi anggaran dekonsentrasi PMA dengan menggunakan pendekatan Value for Money serta dampaknya terhadap kualitas pengawasan investasi masih belum banyak dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efisiensi penggunaan anggaran dekonsentrasi PMA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat melalui perspektif Value for Money. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola teknis anggaran serta aparatur pelaksana PMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP melakukan berbagai langkah adaptif untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi keterbatasan anggaran, di antaranya melalui digitalisasi pelayanan menggunakan SIPOPEI, integrasi beberapa agenda kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan jejaring eksternal. Berbagai upaya tersebut mampu mendukung efisiensi administrasi dan menjaga keberlangsungan pelayanan investasi. Namun demikian, keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan monitoring berdampak pada menurunnya intensitas pengawasan lapangan dan berkurangnya validitas proses verifikasi data investasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya konsekuensi antara upaya pencapaian efisiensi fiskal dengan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan investasi. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman mengenai konsep Value for Money dalam pengelolaan anggaran dekonsentrasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya dapat diukur melalui besarnya penghematan biaya maupun tingkat serapan anggaran, tetapi juga melalui kemampuan organisasi dalam menjaga mutu pengawasan dan akurasi data investasi. Selain itu, temuan penelitian ini memperkaya kajian mengenai efisiensi sektor publik dalam konteks fasilitasi investasi daerah sekaligus menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang didasarkan pada kebutuhan nyata serta penguatan kapasitas tata kelola kelembagaan guna mempertahankan efektivitas kebijakan investasi secara berkelanjutan.

Kata kunci: anggaran dekonsentrasi, Penanaman Modal Asing, Value for Money, efisiensi anggaran, investasi daerah

PENDAHULUAN

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu instrumen strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, penciptaan kesempatan kerja, transfer teknologi, serta penguatan daya saing ekonomi. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan investasi tidak hanya berfungsi sebagai pendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sumber penting dalam pengembangan berbagai sektor produktif yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan realisasi investasi melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen yang dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung pencapaian target investasi adalah anggaran dekonsentrasi. Melalui mekanisme dekonsentrasi, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan serta pengawasan investasi. Dalam bidang penanaman modal, anggaran dekonsentrasi digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti fasilitasi investasi, pembinaan pelaku usaha, pengendalian pelaksanaan investasi, serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dekonsentrasi menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan investasi di daerah.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya alokasi dana operasional untuk berbagai program pemerintah, termasuk program dekonsentrasi di bidang penanaman modal. Pada saat yang sama, target realisasi investasi yang harus dicapai oleh pemerintah daerah terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi organisasi pelaksana karena dituntut untuk tetap menjaga kualitas pelayanan dan pengawasan investasi di tengah keterbatasan sumber daya yang tersedia. Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran mampu mendukung pencapaian tujuan program tanpa mengurangi kualitas output maupun outcome yang dihasilkan.

Kajian mengenai efisiensi pengelolaan anggaran sektor publik telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efisiensi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kualitas perencanaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta tingkat serapan anggaran. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memandang efisiensi sebagai kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada efisiensi belanja pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan sektor publik secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji efisiensi penggunaan anggaran dekonsentrasi pada sektor penanaman modal, khususnya dalam konteks fasilitasi Penanaman Modal Asing (PMA), masih relatif terbatas.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung mengukur efisiensi dari aspek administratif, seperti tingkat serapan anggaran dan besarnya penghematan biaya yang dapat dicapai. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana kebijakan efisiensi anggaran memengaruhi kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan investasi, validitas data investasi, serta pencapaian tujuan program secara substantif. Padahal, dalam perspektif *Value for Money*, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan organisasi melakukan penghematan sumber daya, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan menghasilkan *output* dan *outcome* yang berkualitas. Oleh karena itu, masih terdapat *research gap* berupa keterbatasan kajian yang menghubungkan efisiensi anggaran dekonsentrasi dengan kualitas pelaksanaan fungsi investasi di daerah melalui pendekatan *Value for Money*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis efisiensi penggunaan anggaran dekonsentrasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana efisiensi penggunaan anggaran dekonsentrasi PMA diterapkan berdasarkan prinsip *Value for Money* serta bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengawasan investasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi penggunaan anggaran dekonsentrasi PMA berdasarkan dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai efisiensi sektor publik melalui pengembangan penerapan pendekatan *Value for Money* pada pengelolaan anggaran dekonsentrasi di bidang penanaman modal. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah

dalam menyusun strategi pengelolaan anggaran yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kualitas pelaksanaan fungsi investasi secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efisiensi penggunaan anggaran dekonsentrasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses pengelolaan anggaran, strategi adaptasi organisasi dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, serta implikasinya terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengawasan investasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih komprehensif berdasarkan pengalaman, persepsi, dan praktik yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Penelitian dilaksanakan di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dekonsentrasi PMA. Unit analisis penelitian ini adalah pengelolaan anggaran dekonsentrasi PMA yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan anggaran dalam mendukung kegiatan penanaman modal. Fokus tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan upaya organisasi dalam mencapai target investasi di tengah keterbatasan sumber daya akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan meliputi pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan anggaran dekonsentrasi PMA, memahami proses pelaksanaan program, serta memiliki kewenangan atau pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga mencapai titik kejenuhan data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh dari informan tambahan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan program dan anggaran dekonsentrasi PMA. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan realisasi investasi, regulasi terkait, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses seleksi, penyederhanaan, pengkodean (*coding*), dan pengelompokan data berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam kerangka *Value for Money*. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, matriks, dan kategorisasi tematik untuk mempermudah identifikasi pola hubungan antar-temuan. Proses interpretasi dilakukan dengan membandingkan hasil temuan lapangan dengan konsep *Value for Money* dan literatur yang relevan sehingga dapat menjelaskan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan dan pengawasan investasi.

Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan program. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengonfirmasi kesesuaian data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan ulang informasi pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi data. Selain

itu, hasil analisis juga diverifikasi dengan dokumen resmi dan informasi pendukung lainnya guna meningkatkan validitas serta kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dekonsentrasi dalam Mendukung Kinerja PMA di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Implementasi efisiensi anggaran pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak berorientasi pada pengurangan jumlah program atau penghentian kegiatan, melainkan pada penyesuaian pola pelaksanaannya agar pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, langkah efisiensi dilakukan melalui penggunaan teknologi digital untuk mendukung koordinasi dan pengawasan, pembatasan perjalanan dinas yang tidak bersifat mendesak, serta pengintegrasian beberapa agenda kerja ke dalam satu kunjungan lapangan. Pendekatan ini mencerminkan adanya perubahan strategi operasional yang memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tetap berlangsung di tengah berkurangnya dukungan anggaran dekonsentrasi.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efisiensi dipahami sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketepatan penggunaan sumber daya, bukan semata-mata sebagai pengurangan pengeluaran. Perspektif ini sejalan dengan konsep *value for money* yang dikemukakan oleh Mardiasmo, yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut tercermin pada kemampuan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat untuk tetap menjalankan pelayanan dan pembinaan investasi melalui penyesuaian metode kerja sehingga tujuan organisasi dapat dipertahankan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Di sisi lain, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan strategi efisiensi juga membawa implikasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Berkurangnya intensitas kunjungan lapangan menyebabkan proses verifikasi terhadap kondisi aktual perusahaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga terdapat kecenderungan menurunnya kedisiplinan sebagian pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kondisi ini menunjukkan adanya konsekuensi yang perlu dikelola, yaitu menjaga keseimbangan antara upaya penghematan biaya operasional dengan kebutuhan untuk mempertahankan kualitas pengawasan investasi. Oleh karena itu, temuan penelitian menguatkan bahwa keberhasilan efisiensi anggaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menekan biaya, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mempertahankan efektivitas pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengawasan dalam mencapai tujuan kebijakan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Efisiensi Anggaran pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi efisiensi anggaran dekonsentrasi pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkaitan. Kedua kelompok faktor tersebut tidak hanya memengaruhi proses pelaksanaan efisiensi anggaran, tetapi juga menentukan kemampuan organisasi dalam mempertahankan kualitas pelayanan dan pengawasan investasi di tengah keterbatasan sumber daya. Dari sisi internal, berdasarkan hasil wawancara dengan mayoritas informan, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu faktor yang paling mendukung implementasi efisiensi anggaran. Penggunaan media komunikasi daring seperti Zoom, WhatsApp, dan platform digital lainnya memungkinkan koordinasi dengan pelaku usaha maupun pelaksanaan rapat dilakukan secara lebih fleksibel tanpa memerlukan biaya perjalanan dinas yang besar. Selain itu, kemampuan aparatur dalam menyesuaikan pola kerja melalui penggabungan beberapa agenda dalam satu kegiatan lapangan turut meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan

efisiensi tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga pada kemampuan organisasi mengelola sumber daya secara adaptif dan inovatif.

Berdasarkan informan kunci, perencanaan kegiatan yang berbasis skala prioritas juga menjadi faktor internal yang mendukung pelaksanaan efisiensi. Kegiatan yang dianggap memiliki tujuan serupa atau saling berkaitan diintegrasikan dalam satu pelaksanaan sehingga penggunaan anggaran dapat dioptimalkan. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kualitas perencanaan dengan implementasi efisiensi anggaran, di mana perencanaan yang baik memungkinkan organisasi mencapai keluaran yang diharapkan meskipun berada dalam kondisi keterbatasan pendanaan. Dengan demikian, efisiensi tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan mengalokasikan sumber daya secara tepat guna. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor eksternal yang menjadi tantangan dalam implementasi efisiensi anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, berkurangnya alokasi dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat mendorong DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penyesuaian terhadap pola pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program dan mengurangi frekuensi kegiatan yang memerlukan biaya operasional tinggi, khususnya pengawasan langsung di lapangan. Selain itu, menurut informan kunci, tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) juga memengaruhi efektivitas implementasi efisiensi anggaran. Berkurangnya intensitas kunjungan lapangan mengakibatkan proses verifikasi terhadap laporan yang disampaikan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga terdapat potensi perbedaan antara data administratif dengan kondisi aktual di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan efisiensi anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan internal organisasi, tetapi juga bergantung pada dukungan dan kepatuhan pihak eksternal yang terlibat dalam proses penyelenggaraan investasi.

3. Strategi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dalam Mempertahankan atau Meningkatkan Kinerja Investasi Ketika Dukungan Dana Dekonsentrasi Menurun hingga Tidak Dialokasikan pada Tahun 2025

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dijalankan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran dekonsentrasi lebih menitikberatkan pada penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan pengurangan fungsi atau tugas organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan mayoritas informan, langkah-langkah yang ditempuh meliputi pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana koordinasi dan komunikasi, penggabungan beberapa agenda kerja dalam satu pelaksanaan kegiatan lapangan, serta penyusunan skala prioritas terhadap program yang memiliki relevansi langsung dengan pelayanan dan pengawasan investasi. Strategi tersebut menunjukkan adanya upaya adaptasi organisasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap dapat berlangsung secara optimal meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Menurut informan kunci, penggunaan media komunikasi berbasis daring memberikan alternatif yang efektif dalam menjaga koordinasi dengan pelaku usaha maupun instansi terkait tanpa harus selalu melaksanakan pertemuan secara langsung. Di samping itu, pengintegrasian beberapa kegiatan dalam satu perjalanan dinas dinilai mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus menekan biaya operasional.

Berdasarkan temuan tersebut, strategi yang diterapkan tidak hanya diarahkan untuk melakukan penghematan belanja, tetapi juga bertujuan mempertahankan kesinambungan pelayanan publik melalui pengelolaan sumber daya yang lebih optimal. Dari sudut pandang analitis, strategi tersebut mencerminkan penerapan prinsip manajemen strategis pada sektor publik yang menekankan pentingnya kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan, termasuk perubahan kebijakan fiskal dan keterbatasan sumber daya. Penyesuaian yang dilakukan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat mengindikasikan bahwa fleksibilitas dalam

pengelolaan program menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, efisiensi anggaran tidak dipahami semata-mata sebagai upaya mengurangi aktivitas, melainkan sebagai proses penataan ulang metode kerja agar sasaran organisasi tetap dapat diwujudkan secara efektif. Temuan penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan konsep *value for money* yang dikemukakan oleh Mardiasmo, yang menegaskan bahwa pengelolaan anggaran publik harus mengintegrasikan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap proses pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, penerapan digitalisasi koordinasi, penyusunan prioritas kegiatan, dan integrasi pelaksanaan pengawasan mencerminkan upaya organisasi untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian, efektivitas strategi tidak hanya dilihat dari kemampuan melakukan penghematan anggaran, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kualitas pelayanan serta mendukung keberlanjutan fungsi pembinaan dan pengawasan investasi. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, implementasi strategi tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan dalam pelaksanaannya. Berkurangnya intensitas kunjungan langsung ke lapangan menyebabkan proses verifikasi terhadap kondisi faktual perusahaan tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga pengawasan lebih banyak mengandalkan laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Menurut informan kunci, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan informasi yang digunakan dalam proses pembinaan dan evaluasi kegiatan penanaman modal. Oleh sebab itu, efektivitas strategi yang telah diterapkan masih memerlukan dukungan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif agar upaya efisiensi anggaran tetap sejalan dengan terjaganya kualitas fungsi pengendalian dan tata kelola investasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa implementasi efisiensi anggaran dekonsentrasi pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat tidak hanya berkaitan dengan pengurangan penggunaan anggaran, tetapi lebih menekankan pada kemampuan organisasi dalam menyesuaikan pola kerja agar tujuan pelayanan dan pengawasan penanaman modal tetap dapat dicapai secara optimal. Dengan kata lain, efisiensi diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih adaptif sehingga organisasi tetap mampu menjalankan fungsi utamanya meskipun berada dalam kondisi keterbatasan fiskal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan efisiensi anggaran merupakan hasil dari interaksi antara kapasitas internal organisasi dan pengaruh faktor eksternal. Kemampuan untuk berinovasi, memanfaatkan teknologi, serta menetapkan prioritas kegiatan menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Di sisi lain, perubahan kebijakan anggaran dan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan turut memengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan investasi. Oleh karena itu, efisiensi anggaran perlu dipandang sebagai proses pengelolaan yang melibatkan aspek kelembagaan, tata kelola, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dari perspektif akademik, hasil penelitian ini mempertegas relevansi konsep *value for money* dalam pengelolaan anggaran publik, yang menempatkan efisiensi sebagai bagian dari upaya mencapai manfaat maksimal melalui penggunaan sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif. Temuan ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa strategi adaptif dalam pengelolaan anggaran dekonsentrasi dapat menjadi pendekatan yang mendukung keberlanjutan tata kelola penanaman modal, sehingga kualitas pelayanan publik tetap terpelihara meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Eka Nova Shintawati. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Sektor Kesehatan di Provinsi Banten. *Jurnal Syntax Administration*, 4(7), 1025–1033.

- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- M. Husaini, Siti Raudah, M. A. (2023). Implementasi Program Perluasan Jangkauan UMKM di Kabupaten Balangan. *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2134–2139.
- Mita Dwi Anggraini et. al. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 111–120.
- Muhammad Zidan Ma`ruf, dkk. (2026). Analisis Implementasi Invoice Management System (INES) Pada Divisi Finance Telkom Property. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 355–365.
- Nichy Oktaviani. (2024). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 748–754.
- Orchidea. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dana Dekonsentrasi Terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 6(2), 200–210.
- Putri, J. K., Fhon, T., Arifin, N., Syavira, R., Nur, Z. R., Nasution, M., & Qolbiah, A. (2022). Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia. *JOSR: Journal of Social Research*, 1(3), 201–212.
- Rizki Adi Putra. (2024). Analisis Pola Penyebaran Investasi Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Untar*, 29(01), 40–59.
- Rohman, M. N., & Rismana, D. (2021). Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Volksgeist*, 4, 221–232.
- Sitti Nurtina. (2025). Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 27(1), 36–51.
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8, 129–138.
- Vera Sabtrianti. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(17).
- Wahyuni, S., & Putri, N. E. (2024). Peran DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 11.
- Wulandari, A., Fatimah, S., & Fitriasia, A. (2026). Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah dalam Pespektif Filsafat Ilmu : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 07(01), 1–11..